

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustina, Shinta dkk. 2016. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2013. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip.
- Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Askin, Moh. dkk. 2011. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Editama.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Effendy, Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdan, M. 2012. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Hardana, Petrus. 2011. *Implementasi Supremasi Hukum Guna Mengoptimalkan Keamanan Dalam Negeri dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhanas.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Edward O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Jaya, Surya. 2010. *Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Elsam.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*. Bandung: PT Alumni.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Patiro, Yopie Morya Immanuel. 2012. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Keni Media.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rizki, Gerry Achmad. 2014. *KUHP & KUHP: Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 dalam KUHP*. Jakarta: Permata Press.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sasangka, Hari. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sidartha, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinamo, Nomensen. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. 2016. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Susanto, Sri Nur Hari. 2020. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan". *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3(3): 430-441.
- Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid 2*. Semarang; Badan Penerbit Undip.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Jurnal Ilmiah:

- Alamri, Hadi. 2017. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Privatum*. Vol. 5 (1): 31-38.
- Amiruddin. 2012. "Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8 (I): 26-37.
- Ansori, Lutfil. 2017. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis*. Vol. 4 (2): 148-163.

- Argiya, Viola Sinda Putri Mita. 2013. "Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih", *Recidive*. Vol. 2 (2): 162-170.
- Cahyaningsih, Diana Tantri. 2020 "Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot", *Jurnal RechtsVinding Online*.
- Derek, Briant. "Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* Menurut Hukum Pidana Di Indonesia". *Lex et Societatis*. Vol. 5(5): 115-116.
- Firdaus, A.S dan G. Feriza. 2015. "Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana". *Lex Jurnalica*. Vol. 12 (3): 222-233.
- Hasbullah, 2017. "Perintah Atasan atau Jabatan (*Ambtelijk Bevel*) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi". *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni*. Vol. 1 (1): 84-94
- Manan, Bagir. 2012. "Asas-Asas Peradilan Dalam Hukum Internasional". *Varia Peradilan*. No.324: 1-25.
- Mahardhika, Vita. 2021 "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol. 16 (12): 140-155.
- Muharikin, Irfan Maulana. 2015. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non-Self Incrimination". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Remincel. 2019. "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana". *Ensklopedia of Jurnal*. Vol. 1 (2): 268-273.
- Sabirin. 2021. "Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan". *Jurnal Hukum Al 'Adl*. Vol. 13(2): 459-482.
- Sijabat, Heryanto. 2016. "Tugas Dan Kewenangan Pejabat Perbendaharaan Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Ilmiah Galuh Justici*. Vol. 4 (1): 1-10.
- Sitompul, Herman. 2019. "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan STIH Painan*. Vol 6 (2): 108-123.

- Sukananda, Satria. 2018. “Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (*Legal Gaps*) Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 1 (2): 135-158
- Syafrudin, Ateng. 2000. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”. *Jurnal Pro Justisia*. Edisi IV
- Toule, Elsa. 2016. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3(3): 103-110.
- Umboh, Prisco Jeheskiel. 2013. “Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana”. *Lex Crimen*. Vol. 2(2): 112-124.

Literatur Lain dan Putusan:

- Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. 2017. *Panduan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Buku Saku Memahami Untuk Membasmi Korupsi*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*.
- Indonesia Corruption Watch. 2022. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Agustus 2021
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks tanggal 24 November 2021